

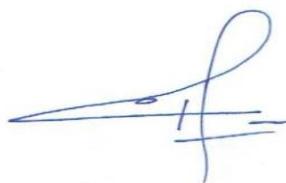
## KATA PENGANTAR

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menyelesaikan dengan berpedoman pada rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2023. Penyusunan Renja juga mengacu kepada RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan di dalam visi Menuju Kabupaten HSS Yang Cerdas, Inovatif, Teknologi dan Agais untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020.

Kandangan, 10 Juli 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Drs. Hendro Martono, MT

Pembina Tk. I

19730309 199402 1 002

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 LATABELAKANG .....	4
1.2 LANDASAN HUKUM .....	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	7
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN LALU</b>	
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISKOMINFO .....	8
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISKOMINFO .....	13
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISKOMINFO .....	12
2.4 REVIEW TERHADP RANCANGAN AWAL RKPD .....	14
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....	14
<b>BAB III TUJUAN, SASARAM, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	16
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISKOMINFO .....	17
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	19
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	21

## LAMPIRAN

- **RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**

## DAFTAR TABEL

	Hal
<b>TABEL 2.1</b>	
<b>REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 DENGAN TRIWULAN IV .....</b>	<b>9</b>
<b>TABEL 2.2</b>	
<b>CAPAIAN KINERJA DISKOMINFO KAB. HSS TAHUN 2020 TRIWULAN IV.....</b>	<b>12</b>
<b>Tabel 2.3</b>	
<b>ISU STRATEGIS DISKOMINFO BERDASARKAN TUPOKSI .....</b>	<b>15</b>
<b>TABEL 3.1</b>	
<b>PENJABARAN VISI, MISI DAN TUJUAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN .....</b>	<b>18</b>
<b>TABEL 3.2</b>	
<b>URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020 .....</b>	<b>19</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat diikuti dan dimonitor pencapaiannya.

Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semestinya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, serta program, kegiatan yang direncanakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya rencana kinerja yang disusun menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara pemerintah dengan DPRD (menjadi dokumen pelaksanaan anggaran/ DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat perjanjian kinerja (Penetapan Kinerja) dengan antasan langsungnya, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja tahunan instansi pemerintah (LAKIP).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah Daerah Bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupate Hulu Sungai Selatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun kembali Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan pembangun selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berkembang serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan viss Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu *“Menuju Kabupaten HSS Yang Cerdas, Inovatif, Teknologi dan Agais untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat ”*

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja ( Renja – SKPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) . Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas
2. Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM);
  - c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 137 ayat (1) menyatakan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11)

7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi arah kebijakan keuangan, strategi kebijakan dan sasaran strategis selama tahun 2020 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 adalah sebagai acuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten HSS sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten HSS.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

#### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- C. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV. PENUTUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISKOMINFO Tahun Lalu (Tahun 2019) dan Capaian Renstra DISKOMINFO**

Di tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS akan melaksanakan 6 program dengan 22 Kegiatan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdiri pada Januari 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum bisa membandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.1

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019 Sampai Dengan Triwula II

## PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT TRIWULAN II

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)				
				TW 1	TW2	TW3	TW4	TW 1	TW2	TW3	TW4	TW 1	TW2	TW3	TW4	
	<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi</b>															
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks</b>	<b>23,50</b>	22,40	22,80	23,10	23,50	22,40	22,88	0	0	100%	0	0	0	0
	<b>Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan</b>															
	<b>Nilai / Predikat AKIP</b>	<b>Nilai/ Predikat</b>	<b>81,89 (A)</b>				81,89 (A)									
1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan Daerah	Persen	100%	65,22	78,26	86,96	100	65,22	78,26			100%	100%		
1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	10	11	13	15	10	11			100%	100%		
1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	8	10	11	12	8	10			100%	100%		

## PENCAPAIAN KINERJA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TRIWULAN II

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)				
				TW 1	TW2	TW3	TW4	TW 1	TW2	TW3	TW4	TW 1	TW2	TW3	TW4	
	<b>Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana penunjang perekonomian yang berkualitas</b>	%	100%	20%	53%	80%	100%	7%	133%			7%	133%			
	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	SKPD	15 SKPD	3	8	13	15	1	20			7%	133%			
		Aplikasi	5 Aplikasi	2	4	5		6	13			120%	260%			
	Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Teknologi dan Informatika	SKPD	15 SKPD	3	8	13	15	1	20			7%	133%			
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi															
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Akses Internet															
	<b>Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah</b>	%	100%	40%	80%	100%		120%	260%			120%	260%			
	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Aplikasi	5 Aplikasi	2	4	5		6	13			120%	260%			
	<b>Membangun Citra Positif Pemkab Kabupaten HSS</b>	Berita	500	150	300	450	500	202	213			40%	43%			
	Program Pelayanan Informasi dan Media Massa	PD	38	38				38								

		Persentase kegiatan pemerintah kabupaten HSS yang terpublikasi	%	100%	30%	60%	90%	100%	40%	43%			40%	43%		
	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah	Perangkat Daerah yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	PD	38	38				38							
	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Produksi Informasi Yang Terpublikasi	Informasi	500	150	300	450	500	202	213			40%	43%		
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana LPPL Kandungan TV															
	Kegiatan Paket Acara LPPL Kandungan TV															

**PENCAPAIAN KINERJA URUSAN PERSANDIAN DAN STATISTIK  
TRIWULAN II**

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)				
				TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
Meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan statistik dan persandian	Dokumen statistik yang tersedia	Dokumen	3 Dokumen				3 Dokumen									
	%Pengamanan informasi daerah	%	100%				100%									

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

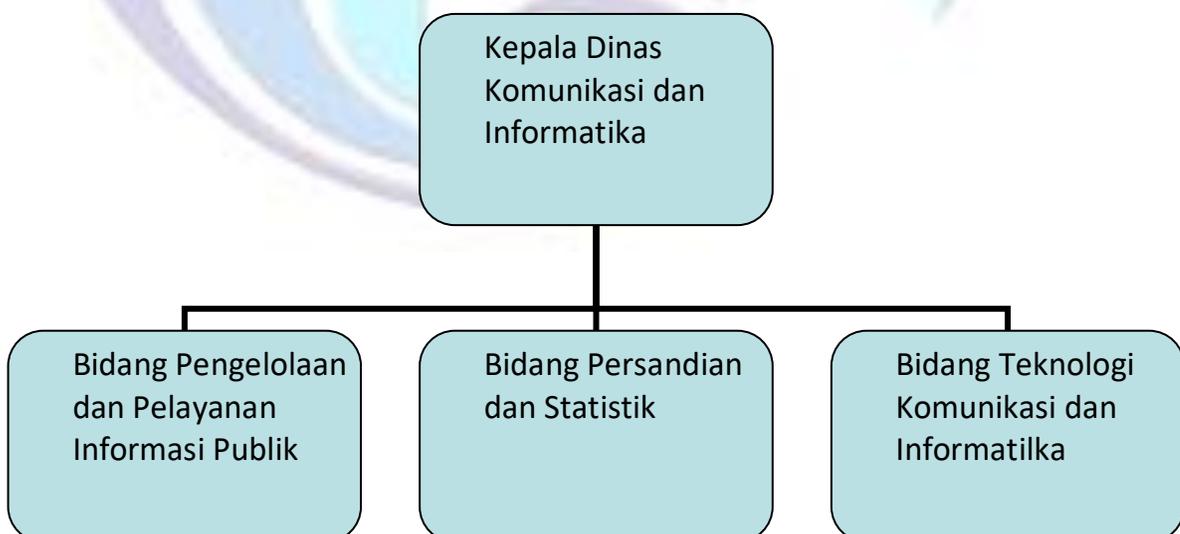
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai pada Triwulan II tahun 2019 telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya :

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan azas-azas pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan aturan umum penyelenggaraan Negara.

Tugas, fungsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai 3 bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sseperti tergambar pada gambar 2.1 di bawah ini :

Gambar 2.1  
Pembagian Bidang Diskominfo Kab. HSS



### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tupoksinya dapat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Isu Strategis Diskominfo Berdasarkan Tupoksi**

<b>TugasPokok</b>	<b>Fungsi</b>	<b>IsuStrategis</b>
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.	Penyusunan kebijakan teknis urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, persandian dan statistic	Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Governance
		Belum Efisiensinya Infrstruktur Telekomunikasi
		Berkembangnya teknologi informasi berdampak pada informasi yang negatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 terdapat perbedaan dengan rancangan di tahun 2019 terdapat yaitu penambahan pada program menjadi 7 dan 18 kegiatan, serta penyesuaian pada nama program dan kegiatan.

#### **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan di awal tahun 2020 dimana usulan masyarakat dapat ditampung melalui Musrenbang Kecamatan, belum ada usulan terkait program dan kegiatan yang menyangkut tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu *Techno Economy*, teknologi menjadi factor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjasinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya menjadi perekonomian yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Akibat dari kondisi tersebut, salah satu kekuatan bangsa dapat pula diukur dari kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai factor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energy untuk peningkatan daya saing. Pembangunan iptek merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu, iptek menentka tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumberdaya baru yang lebih bernilai.

Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan Negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah harus berjalan beriringan dalam mengembangkan potensi daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya animo masyarakat yang berusaha berinteraksi dengan pemerintah daerah khususnya tentang pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kondisi tersebut memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan situasi yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HSS**

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu terkait penyusunan kebijakan teknis urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Sekretariat, Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Bidang Persandian dan Statistik, dan Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika.

Isu strategis yang diangkat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- 2.5.1 Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Governance
- 2.5.2 Belum Efisiensinya Infrstruktur Telekomunikasi
- 2.5.3 Berkembangnya teknologi informasi berdampak pada informasi yang negatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

Berdasarkan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berikut penjabaran misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Tabel 3.1**  
**Penjabaran visi, misi dan tujuan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan public yang berkualitas berbasis teknologi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana penunjang perekonomian yang berkualitas
	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah
	Membangun Citra Positif Pemkab Kabupaten HSS	Membangun Citra Positif Pemkab Kabupaten HSS
	Meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan statistik dan persandian	Meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan statistik dan persandian
	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan public	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik

### 3.3 Program dan Kegiatan

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Sementara kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 merupakan pelaksanaan operasional tahun kedua dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020 – 2023 dan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020. Hal tersebut tertuang dalam table berikut :

**Tabel 3.2**  
**Uraian Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
0	<b>Non Urusan</b>					
0	0					
0	0	7	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan Daerah; Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP</b>	<b>100 Persen ;0 Peringkat</b>	<b>0</b>
0.00..007.7	Penyusunan Dokumen Keuangan	Kabupaten, SKPD	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 Dokumen	5,000,000	
0.00..007.8	Penyusunan Dokumen AKIP	Kabupaten, SKPD	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	15 Dokumen	5,000,000	

0	0	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Tingkat Kepuasan Pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
	0.00..001.1			Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Kabupaten, SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 Tahun	89,088,400
	0.00..001.2			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten, SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	606,320,000
	0.00..001.5			Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Kabupaten, SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	14,000,000
	0.00..001.6			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	23,352,000
	0.00..001.8			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	690,750,000
	0.00..001.9			Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	319,975,000
0	0	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Tingkat Kepuasan Pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
	0.00..002.14			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	161,472,300
	0.00..002.22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Gedung Kantor kondisi baik	1 Tahun	30,000,000
	0.00..002.24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	1 Tahun	63,900,000
	0.00..002.31			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	1 Tahun	98,300,000
0	0	10		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Tingkat Kepuasan Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
	0.00..010.67			Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah	Kabupaten, SKPD	Perangkat Daerah yang melaksanakan KIP	38 OPD	14,345,000
	0.00..010.68			Sosialisasi Teknologi dan Informatika	Kabupaten	SKPD yang terkoneksi jaringan internet dan atau intranet ke Server Center Diskominfo	15	30,000,000
1				<b>Wajib</b>				
1	18			<b>Komunikasi dan Informatika</b>				
1	18	21		<b>Program Pelayanan Informasi dan Media Massa</b>		<b>Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); Persentase Kegiatan Pemerintah Kabupaten HSS yang Terpublikasi</b>	<b>100 Persen ;100 Persen</b>	<b>0</b>
	1.18..021.1			Peningkatan Sarana dan Prasarana LPLP Kandungan TV	Kabupaten, SKPD	Jumlah Produksi Informasi Yang Terpublikasi	500 Informasi	151,850,000

1.18..021.3				Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Kabupaten, SKPD	Jumlah Produksi Informasi Yang Terpublikasi	500 Informasi	3,253,960,000
1	18	23		<b>Program Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>		<b>Jumlah Aplikasi e-Government yang berfungsi dengan baik ; Jumlah SKPD/Desa yang Terkoneksi dengan Intranet ke Server Center Diskominfo</b>	<b>15 SKPD;23 SKPD</b>	<b>0</b>
1.18..023.8				Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Jumlah aplikasi e-Governement yang terintegrasi di server center Diskominfo	39,47 Persen	1,982,675,000
1	23			<b>Persandian</b>				
1	23	22		<b>Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah</b>		<b>Ketersediaan data statistik ; informasi yang diamankan</b>	<b>3 Buku ;240 Telegram senapati</b>	<b>0</b>
1.23..022.2				PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH	Kabupaten, SKPD	Jumlah Dokumen Statistik Daerah yang dikeluarkan	3 Buku	92,105,000
				TOTAL				<b>7,632,092,700</b>

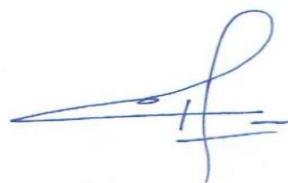
## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 disusun sebagai pelaksanaan tahun pertama bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena SKPD tersebut baru berdiri pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagai Renja review, pedoman dokumen bersumber dari pecahan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebelumnya.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat member umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas oleh para pemimpin manajemen dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat dengan pembangunan IPTEK melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (*stakeholder*) dalam mewujudkan *Good Governance*.

Kandangan, 10 Juli 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Drs. Hendro Martono, MT

Pembina Tk. I

19730309 199402 1 002

